TAJUK RENCANA

Lantangkan Komitmen Antikorupsi Dunia Usaha

TIADA hari tanpa berita korupsi. Ini fakta! Mengingat pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti. Kisah penangkapan mulai penyergapan, operasi tangkap tangan hingga buron yang masih dalam DPO ada dalam kasus korupsi negeri ini. Ironisnya, para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Kurangkah yang mereka dapat sehingga masih harus korupsi?

Pertanyaan tersebut acapkali muncul dan terdengar di masyarakat. Dan kian beragam pula jawaban akan alasan seseorang melakukan korupsi. Penulis Jack Bologna yang dikutip laman aclc.kpk.go.id mengungkap factor penyebab korupsi adalah keserahan (greedy), kesempatan (opportunity), kebutuhan (need) dan pengungkapan (exposure). Mirisnya, factor-faktor dalam Teori GONE ini berjalin berkelindan dan menguatkan.

Sifat serakah berpotensi dimiliki setiap orang. Dan dalam teori GO-NE dijelaskan, koruptor pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Keserakahan ditambah ada kesempatan, akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi akan semakin menggila karena gaya hidup hedonis yang tidak bisa dihindari. Apalagi pengungkapan atau penindakan atas pelaku hanya enteng-enteng saja, tidak menimbulkan efek jera.

Keserakahan karena ingin memonopoli proyek-proyek membut para pelaku usaha seperti disebut Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, terjerat korupsi. Mereka, adalah 371 pengusaha yang ingin proyek di suatu daerah dan ingin mendapatkan prioritas tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku seperti misal pengurusan perizinan. Dan mereka 'bertemu' pejabat pemerintah yang serakah, ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Keserakahan yang membawa dampak sangat berbahaya. Ketika jika

pikiranpembaca@gmail.com

MENUNGGU jemputan sem-

bari melihat keadaan di sekitar,

membuat hati menangis. Bagai-

mana tidak? Ketika sedang berte-

duh di depan Pasar Beringharjo

saya memperhatikan ke bawah.

Ternyata lahan sekitar tanaman

perindang itu tidak tertutup rapat,

namun ditutup dengan besi sema-

cam teralis jendela. Sehingga

tampak kotakan tanah di bawah-

Yang membuat miris, ternyata di

lahan sempit itu penuh dengan

sampah plastic yang dibuang se-

cara sembarangan oleh orang ti-

nva

dunia usaha dijadikan ladang tindak pidana korupsi, maka hasil atau kualitas layanan yang didapat tidak akan maksimal. (KR, 28/5).

Semua dengan modus yang sudah lama dan paling banyak dilakukan adalah dengan penyuapan atau pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Dalam situs resmi KPK, dijelaskan, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian ini tercantum dalam UU Nomor 20/2021 penjelasan pasal 12b ayat (1).

Itulah sebab gratifikasi perlu dilaporkan. Karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara lewat penerimaan hadiah dari pengusaha dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar. Dan hal ini akan menjadi kebiasaan bila dibiarkan terus berlangsung. Inilah sebab ASN dilarang menerima bingkisan lebaran apalagi dari pengusaha.

Gratifikasi adalah suatu tindakan yang menjadi awal mula dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gratifikasi adalah pelanggaran hukum seperti yang tertera pada Pasal 12B dan Pasal 12C UU No 20 Tahun 2001. Kini, KPK berkomitmen mendorong pelaku usaha dan asosiasi agar tidak terlibat praktik pidana korupsi bagi dunia usaha. Untuk itu, pendekatan penindanan harus dibarengi pendekatan pendidikan dan pencegahan. Tentu, komitmen antikorupsi dunia usaha yang didukung secara multisectoral, terus dilantangkan. Harus diakui, ini bukan pekerjaan ringan. Bahkan sangat berat dan tidak mudah. 🖵-f

0895-6394-11000

dak bertanggung jawab. Bahkan

saya sempat melihat seorang ba-

pak sepuh yang juga membuang

sampah plastiknya dan membe-

lasakkan lewat celah besi, usai

menikmati kudapannya. Mengapa

tidak mau beranjak sedikit meng-

ingat di depan pintu pasar terdapat

dibuka dan kemudian dibersihkan.

namun plastik yang sudah terlan-

jur terkubur akan merusak tanah

yang sedikit untuk hidupnya perin-

*) Ibu Yanti, Sagan Yogyakarta

Miris. Meski tutup besi bisa

tempat sampah?

dang tersebut. Q-f

Nyaman, Yogya Bergerak Menuju 'Kota Lansia'

MELIHAT angka 1.200 dari 3.300 jemaah haji DIY 2023 adalah lanjut usia (lansia) terasa bila daerah istimewa ini memiliki banyak warga lansia. Apalagi tercatat jumlah penduduk DIY (2018) mencapai 3.664.669 dengan lansia 552.200 (BPS, 2019). Secara rinci, lansia yang hidup sendiri mencapai 123.772 dan yang membuat miris, 46.242 lansia hidup terlantar. Diperkirakan, angka itu sudah lebih tinggi di 2023 ini.

Kondisi kesehatan yang baik, membuat usia harapan hidup di DIY menjadi tinggi, 74,82 tahun. Tentu, pemerintah juga harus siap dan menyediakan langkah konkret memastikan kesejahteraan lansia. Apalagi trend kehadiran lansia akan terus meningkat.

DISEBUT sebagai provinsi dengan persentase laju lansia tertinggi secara nasional, jumlah lansia di DIY pun di atas rata-rata nasional. Banyak faktor penyebabnya. Viral sebagai provinsi termiskin dan sebagian kalangan muda mengakui bukan tempat mencari uang vang ideal, namun falsafah Jawa alonalon waton kelakon membuat DIY terasa nyaman dan menjadi pilihan tinggal di hari tua. Setelah puluhan tahun bekerja di pelbagai wilayah di Indonesia, saat pension memilih tinggal

Tingginya lansia tentu akan menghadirkan pelbagai macam problema. Dan persoalan yang dihadapi lansia bukan sekadar soal ekonomi. Karena dalam masyarakat Jawa terdapat kearifan lokal mikul dhuwur mendhem jero yang dalam terminologi Islam dikenal dengan birrul walidain menekankan kewajiban anak untuk berbakti dan mengabdi orang tuanya. Namun problemanya memang tidak sekadar kesejahteraan.

Jepang, salah satu negara yang sudah lebih awal berhadapan dengan fenomena super aging society. Jumlahnya yang tinggi, membuat pemerintah merumuskan pelbagi program yang memastikan lansia terjamin lewat pekerjaan yang 'seperti tia**Fadmi Sustiwi**

da makna' penulis lihat : menghentikan pejalan kaki di kawasan trotoar karena ada kendaraan ke luar dari gedung kantor, membuka ñ menutup pintu gedung yang kalau di Indonesia sudah dibuat otomatis serta lainnya. Kebijakan Pemerintah Jepang membuat lansia tersebut berdaya dan merasa berpartisipasi pada negara.

Mungkinkah hal tersebut dilakukan di Indonesia khususnya di DIY? Tidak semu-



dah membalikkan tangan. Lontaran kalimat ìkasihan sudah tua harus bekerjaî atau *ìanak-anaknya apa tidak mengurus* va?î. Ada pula ìlho beliau kan mantan pejabat, kasihan sekarang bekerja seperti itu?î. akan didengar. Dan anak ñ jika ada ñ pasti akan menjadi pusat tudingan: tidak berbakti.

Cukup banyak regulasi tingkat undangundang maupun perda untuk melindungi lansia. Jika belum sempurna, bukan menjadi alasan menafikan keberadaan atau eksistensi lansia. Namun dicari celah menyempurnakan dan membuat lansia bahagia sejahtera.

29 MEI, diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Peringatan didasari sejarah ketika Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat didaulat peserta sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjadi pimpinan sidang, 29 Mei 1945. Meski paling sepuh, Dr Radjiman (66) selalu berpikiran cemerlang. Tahun 1996 tanggal tersebut dicanangkan Presiden Soeharto, sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN).

Derajat kesehatan membaik, tingkat keberdayaan lansia tidak bisa diabaikan. Apalagi lansia memiliki pengalaman kehidupan yang lebih dibanding yang muda. Namun selain akses dan layanan ramah lansia menjadi sangat penting, dukungan keluarga merupakan faktor kunci dari kebijakan dan sistem layanan lansia.

Filosofi mikul dhuwur mendhem jero di Yogya kian lengkap. Mengingat landasan pemerintahan secara eksplisit tertulis dalam RPJP Propinsi DIY, Hamemayu Hayuning Bawana. Filosofi ini dijadikan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja (RPJM Propinsi DIY, 2009-2013). Rasa nyaman, membuat Yogya terus bergerak menuju 'Kota Lansia' 🗅-f

*) Fadmi Sustiwi, jurnalis Kedaulatan

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pendidikan Perdamaian, Selamatkan Masa Depan PENDIDIKAN di



Indonesia selalu dihadapkan dengan sejumlah persoalan yang sangat kompleks, salah satunya

adalah kekerasan. Masalah ini telah mengundang perhatian serius banyak pihak, baik pejabat pemerintahan, akademisi dan praktisi pendidikan, hingga masyarakat umum. Mereka banyak yang gelisah karena tindak kekerasan di sekolah kerapkali terjadi dan jumlahnya mencapai angka yang tidak sedikit.

Setiap tahun, kasus kekerasan di sekolah selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Data yang dilansir Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, jumlah kekerasan di sekolah pada 2021 mencapai 14.517 kasus. Tahun 2022 naik menjadi 16.106 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan sangat tajam dibanding tahun sebelum-

Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dikelompokkan dalam kategori ringan, sedang dan berat. Meski demikian, kasus-kasus yang dominan terjadi biasanya berbentuk bullying (perundungan), kekerasan fisik, psikis hingga seksual. Motif menjadi pemicunya sangat beragam, di antaranya balas dendam atau sekadar mendapat pengakuan lingkungan sosial.

Agenda Strategis

kekerasan yang Jumlah terus meningkat, berdampak secara signifikan terhadap penilaian publik kepada sekolah. Sekolah seringkali dinilai belum berhasil mendidik karakter peserta didik yang cinta damai. Sekolah cenderung menghasilkan pelajar yang mudah tersinggung, bertoleransi tipis, kurang menghargai orang lain, dan penganut budaya anti-perdamaian.

Farid Setiawan

Kritik keras yang tidak dapat dibiarkan mengingat fenomena kekerasan di sekolah sudah menjalar ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk DIY. DIY sebagai Kota Pelajar perlu menjadikan upaya penanganan kekerasan di sekolah sebagai program prioritas. Agenda strategis ini perlu dirancang. Upaya ini perlu dilakukan karena tindak kekerasan di sekolah jelas bertentangan dengan misi DIY yang salah satunya hendak mewujudkan dan meningkatkan harmoni kehidupan masyarakat berdasarkan toleransi, tenggang rasa, kesantuan dan kebersamaan.

Upaya yang cukup penting digalakkan di DIY adalah diseminasi dan implementasi pendidikan perdamaian di lingkungan sekolah. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan iklim kehidupan di sekolah yang penuh kedamaian, harmonis dan ketenteraman. Ekosistem seperti ini niscaya dapat terwujud karena pendidikan perdamaian tidak sekadar konsep yang diarahkan pada pembentukan pengetahuan.

Perwujudan ekosistem demikian itu perlu didukung dengan pembentukan budaya sekolah yang kondusif sehingga tercipta lingkungan yang penuh kedamaian. Nilai-nilai pendidikan perdamaian, seperti penghargaan atau respect terhadap perbedaan agama, suku, jender, budaya dan bentuk fisik perlu ditanamkan dalam diri pelajar, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler.

Catur Pusat

Tentu, dalam mewujudkan ekosistem berbasis budaya damai itu tidak dapat dilakukan sendirian oleh pihak sekolah. Banyak pihak, wa bil khusus, catur pusat pendidikan perlu turut andil dan hadir dalam merealisasikan

agenda strategis tersebut. Catur pusat yang dimaksud di sini adalah orangtua, sekolah, masyarakat dan tempat ibadah.

Dalam konteks ini, tempat ibadah, tidak sekadar dijadikan sarana pelaksanaan ibadah tetapi juga media pendidikan yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada generasi muda. Karenanya, diseminasi dan implementasi pendidikan perdamaian di sekolah perlu dipahami sebagai agenda penyelamatan generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa.

Agenda ini mendesak dilaksanakan karena kemuliaan martabat manusia Jogja mustahil dapat terwujud jika di lingkungan sekolah masih tinggi tindak kekerasannya. Mari saling bersinergi untuk melahirkan peace generation dari sekolah. **□-f**

*) Dr Farid Setiawan MPdI, Anggota Dewan Pendidikan DIY, Dosen Universitas Ahmad Dahlan dan Wakil Sektretaris PWM DIY. Naskah kerja sama Dewan Pendidikan DIY - Kedaulatan Rakyat

Pojok KR

271 Pengusaha terjerat korupsi

-- Hati-hati, memberi hadiah = gratifikasi

Bacaleg, 2 BPKal akan undur diri -- Pesona bacaleg lebih menggoda

KPU cek indikasi dana politik dari jaringan narkoba

-- Cukup dicek saja?



Parkir Becak-Andong di Malioboro Perlu Ditata

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat

Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran

kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sampah di Kotak Tanaman di Depan Beringharjo

Naskah dikirim Email atau WA

Melihat Yogya dengan angkutan tradisional andong dan becak, rasanya senang. Kota ini masih menghargai eksistensi angkutan tradisional. Dikala kota-kota lain melibas, Yogya memberi harapan dan kesempatan.

Namun ada yang perlu diperhatikan, karena banyaknya andong di Malioboro, kemudian mereka parkir di pinggir jalan Malioboro, tidak di ceruk jalan

karena sudah penuh becak. Sehingga kadangkala membuat macet. Bahkan kadang membuat kaget kendaraan dari luar kota, karena berjalan agak ke kanan ternyata di depan ada andong ter-

Saya setuju dan bangga dengan masih ada becak-andong di Malioboro, hanya parkir perlu dita-

*) Rani, Karangmalang Sragen

Xedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990

Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945 **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi:

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com iklankryk13@gmail.com

 $Langganan\ per\ bulan\ termasuk\ 'Kedaulatan\ Rakyat\ Minggu'...\ Rp\ 90.000,00,\ Iklan\ Umum/Display...Rp\ 27.500,00/mm\ klm,\ Iklan\ Keluarga...Rp\ 27.5$ $12.000,00\ /\mathrm{mm}\ \mathrm{klm},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Baris/Cilik}\ (\mathrm{min.}\ 3\ \mathrm{baris}.\ \mathrm{maks.}\ 10\ \mathrm{baris})\ .\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Satu}\ \mathrm{Kolom}\ (\mathrm{min.}\ 30\ \mathrm{mm}.\ \mathrm{maks.}\ 100\ \mathrm{mm})\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris},\ \mathrm{Iklan}\ \mathrm{Satu}\ \mathrm{Kolom}\ (\mathrm{min.}\ 30\ \mathrm{mm}.\ \mathrm{maks.}\ 100\ \mathrm{mm})\ \mathrm{Rp}\ 12.000,00\ /\ \mathrm{baris}$ /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) lacktriangle Iklan Warna: Full Colour full Colour 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir; 200% dari tarif , Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

gungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP. Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Drivanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.